Relasi produksi nilai budaya dan perubahan sosial (Studi Masyarakat Nelayan Pelabuhan Paotere pada Masa Pandemi Covid-19)

The Relationship between the Production of Cultural Values and Social Change (Study of the Fisherman Community of Paotere Harbor during the Covid-19 Pandemic)

Andi Murni, Rahmat Muhammad, Sakaria, Muhammad Sabiq

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia

Info Artikel:

Diterima : 22 Juli 2021
Disetujui : 21 Agustus 2021
Dipublikasi : 06 September 2021

Artikel Penelitian

Keyword:

Cultural Values; Social Change; Makassar Fishermen

Korespondensi:

Muhammad Sabiq
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: muh.sabiq77@gmail.com

Copyright © September 2021
The Author(s)

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang nilai budaya yang mendasari perubahan sosial masyarakat nelayan Kota Makassar, dengan Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Paotere sebagai lokus ekonominya. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan pendekatan sosiologis dan memanfaatkan teori strategi dan perubahan sosial sebagai kerangka analisisnya. Penelitian ini menemukan tiga hal penting: pertama, ekonomi masyarakat nelayan mengalami perubahan drastis menuju kemundakan pasca pandemi Covid-19, kedua, sistem nilai dan nilai kebudayaan masyarakat lokal turut terdampak, dimana nilai-nilai kerukunan pun berakhir dengan konflik, ketiga, strategi pemerintah untuk menghadapi perubahan sosial akibat pandemi covid-19 tidak terintegratif, sehingga satu masalah masyarakat mampu teratasi dan dampak buruk covid-19 sedikit tereliminasi, namun pada masalah lain, di sektor yang masih menyangkut mata pencaharian nelayan dan laut, masyarakat nelayan merasakan dirugikan..

Abstract. This study examines the cultural values that underlie social changes in the fishing community of Makassar City, with the Paotere Harbor Fish Auction Place as its economic locus. The type of research is library research. The data were collected using a sociological approach and using the theory of strategy and social change as the analytical framework. This study found three important things: first, the economy of the fishing community experienced a drastic change towards stagnation after the Covid-19 pandemic, second, the value system and cultural values of the local community were also affected, where the values of harmony ended in conflict, third, the government's strategy to facing social changes due to the non-integrative covid-19 pandemic, so that one community problem was able to be resolved and the negative impact of covid-19 was slightly eliminated, but on another issue, in the sector which still involves fishermen and marine livelihoods, fishing communities feel disadvantaged.

I. PENDAHULUAN

Pelabuhan Paotere berlokasi di desa Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelabuhan sebagai salah satu soko guru ekonomi masyarakat mempengaruhi terhadap nilai-nilai budaya maupun sosial, pada akhirnya membentuk karakteristik perilaku masyarakat yang unik. Kusnadi (2009) menyebut, masyarakat nelayan memiliki kebudayaan dan perilaku sosial yang khas, karena mereka merupakan salah satu unsur sosial dalam struktur masyarakat pesisir secara umum (Kusnadi, 2009:39).

Aktivitas perekonomian di lingkungan pelabuhan cukup prospektif, terutama pengembangan kesejahteraan. Kontribusi pelabuhan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat hampir sejajar dengan jasa pariwisata (Ismail, 2001:65). Pertumbuhan ekonomi menjadi motivasi kolektif, yang menggerakkan setiap

individu untuk tujuan-tujuan ekonomi, serta berpikir dan membangun sistem nilai yang tidak bisa dilepaskan pula dari kepentingan ekonomi. Inilah yang Kusnadi maksudkan bahwa karakteristik budaya dan perilaku sosial masyarakat pesisiran memiliki keunikannya tersendiri.

Relasi yang kuat antara kebudayaan lokal dan kepentingan ekonomi lebih dikenal secara konseptual sebagai "*ekonomi kebudayaan*". Yakni, sebuah kerangka metodologis untuk melihat fenomena ekonomi masyarakat dan proses pembangunan ekonomi dalam kerangka dasar evolusi kebudayaan (Depdikbud, 1992:111). Evolusi sendiri mencerminkan tentang sebuah perubahan yang dinamis, dimana nilai-nilai kultural baru terus direproduksi, termasuk nilai-nilai lokalitas. Reproduksi nilai lokalitas semacam ini disesuaikan dengan tujuan pembangunan

ekonomi itu sendiri. Masyarakat nelayan sebagaimana di wilayah sekitar Pelabuhan Paotere juga mengalami evolusi ekonomi kebudayaan ini.

Tahun 2020 adalah masa-masa paceklik, bukan karena hasil tangkapan laut yang berkurang melainkan efek domino yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Masyarakat nelayan Paotere merasakan imbas langsung dari pandemi tersebut. Salah satunya terlihat dari omset yang berkurang karena harga ikan menurun. Turunnya harga ikan sebenarnya merupakan dampak dari perilaku sosial konsumen. Banyak pelelangan ikan sepi pengunjung, ditambah lagi pemerintah pusat dan daerah telah bersepakat untuk menjaga jarak aman, serta menganjurkan agar segala aktivitas dikerjakan dari rumah (LEMSA, 2020).

Pengalaman masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere menjadi pelajaran bahwa ekonomi masyarakat adalah sebuah sistem yang sangat rapuh, tidak memiliki daya tahan internal, dan mudah berubah karena pengaruh eksternal yang tidak diprediksi. Faktor eksternal yang paling berpengaruh mengubah struktur dan sistem yang mengatur aktivitas ekonomi di pelelangan ikan Pelabuhan Paotere sejatinya bukan karena semata-mata pandemi melainkan karena "isu" kebijakan politik pemerintah yang berniat untuk menutup aktivitas mereka. Alasan utama pemerintah adalah mencegah persebaran pandemi (LEMSA, 2020). Dengan kata lain, faktor langsungnya adalah kebijakan politik pemerintah, sementara faktor tidak langsungnya adalah pandemi. Covid-19 hanya sebatas media yang digunakan oleh pemerintah untuk mengubah struktur dan sistem ekonomi masyarakat nelayan.

Relasi pemerintah melalui kebijakan politiknya dengan masyarakat nelayan Pelabuhan Paotere adalah relasi kekuasaan. Inilah yang disebut sebagai integrasi ekonomi, dimana suatu kebijakan politik berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi dan distribusi (May, 2002:87). Integrasi ekonomi semacam ini menjadikan persoalan ekonomi yang berlangsung secara real di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Begitu pula, penurunan harga ikan yang menimbulkan tekanan ekonomi maupun psikologis masyarakat nelayan Paotere tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah terkait sikap ideal selama masa pandemi.

Yang unik di sini adalah solusi yang dibuat, baik oleh pemerintah sendiri maupun inisiatif masyarakat. Pertama, solusi dari pemerintah

Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah penggantian Pejabat Wali Kota Makassar, karena dinilai lamban dalam menangani dampak pandemi. Gubernur Sulses mengatakan, "Kita butuh *strong leader* yang bisa merangkul semua elemen masyarakat yang bisa mengendalikan pemerintahan, untuk mengendalikan COVID-19 di Sulsel." Pemerintah Sulawesi Selatan harus mengamankan warganya, dari puncak gunung, pelosok pedalaman, hingga pulau-pulau yang mencapai 300-an itu (Latjindung, Syukri, & Azis, 2020).

Pernyataan Gubernur Sulsel sangat menarik dari kacamata ekonomi kebudayaan, karena menggunakan nilai-nilai sebagai basis utama dalam mencari solusi atas masalah pandemi, dan kemudian sistem nilai kultural tersebut dijadikan ruh bagi manajemen pemerintahan. Sofyan (2006) mengatakan bahwa seorang pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip merangkul, menggunakan argumen bukan sentiman dan mengajak bukan menghakimi. Gubernur melihat nilai-nilai kepemimpinan yang tangguh, mampu mengkordinasi secara kordinatif, cepat dan tangkas, dalam menangani pandemi merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar, dan karenanya maka pejabat lama harus diganti oleh pejabat baru.

Ketika pandemi tidak kunjung tuntas, sementara pemerintah terus mengupayakan penyelesaiannya, aspek kultural dan nilai-nilai lokal yang turut membantu masyarakat nelayan menghadapi kenyataan hidup adalah berdoa, sambil berhutang dan tetap berusaha semaksimal mungkin (CNNIndonesia, 2020). Salah satu usaha dan strategi bertahan di masa pandemi, masyarakat nelayan di Paotere lebih memilih untuk menjual murah ikan tangkapannya. Mereka berpikiran bahwa harga murah lebih masuk akal dari pada tidak terjual sama sekali. Selain itu, masyarakat pun mulai mengubah pola hidupnya, terutama untuk mengatur keuangan keluarga. Mereka lebih banyak membeli tahu dan tempe untuk lauk sehari-hari. Ditambah lagi, anak-anak di rumah tangga para nelayan ini juga merasa senang dan lebih suka makan tahu tempe (AntaraneWS, 2020).

Hidup sederhana merupakan sistem nilai yang diyakini mampu menciptakan kepribadian seorang pemimpin sejati. Ki Bagus Hadikusumo, misalnya, mengatakan bahwa jika engkau mencari pemimpin sejati maka lihatlah bagaimana dapurnya (Mulkhan, 2007:175). Hidup sederhana dengan mengganti lauk dari ikan menjadi tahu dan tempe, atau rela nan ikhlas menjual ikan

tangkapan dengan harga murah, daripada mubadzir dan tidak terjual, semua itu merupakan nilai-nilai kultural yang menjadi jati diri bangsa, termasuk di lingkungan masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere. Apalagi Gubernur Sulsel sendiri terpaksa harus memecat pejabat lama dan menggantinya dengan pejabat baru juga berasaskan pada nilai-nilai kultural. Semua ini dapat ditarik kesimpulan bahwa reproduksi nilai-nilai lokalitas dalam hubungannya untuk menopang sistem ekonomi pasar menjadi sebuah keniscayaan tersendiri.

Penelitian tentang reproduksi nilai lokalitas dalam hubungannya dengan kapitalitas pasar, terlebih di era pandemi pada masyarakat pelabuhan Paotere menjadi penting. Beberapa penelitian terdahulu lebih membahas tentang aspek interaksi sosial dan reproduksi nilai, seperti yang ditulis oleh Syaiful (2019). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere tidak dapat dipisahkan dari arus global yang semakin kuat. Pasar Indonesia terintegrasi dengan pasar internasional. Namun, proses globalisasi dilihat sebagai sebuah tekanan terhadap kehidupan sosial secara umum, dan merupakan faktor mendasar dalam transformasi masyarakat. Sementara disisi lain, kebudayaan sebagai pedoman dalam beradaptasi dan menjaga kelangsungan hidup, termasuk dalam pengalaman masyarakat pesisir pelabuhan Paotere.

Namun demikian, Syaiful (2019) tidak menyinggung bahwa reproduksi nilai kebudayaan yang dimaksud dapat digunakan untuk mengatasi masalah akibat dampak pandemi Covid-19 dan sekaligus menempa masyarakat nelayan di Paotere. Dalam hal inilah, melihat bagaimana strategi masyarakat bertahan dari dampak pandemi dengan menggunakan modalitas kebudayaan lokal menjadi menarik, lebih-lebih Gubernur Sulsel maupun Nelayan di Paotere sama-sama mendasarkan strategi menghadapi pandemi pada nilai-nilai kultural.

Penelitian Munirah (2019) lebih menekankan bahwa keluarga masyarakat nelayan di Paotere lebih kental nuansa keislaman mereka. Para kepala keluarga muslim berperan sangat besar dalam mentransformasikan nilai-nilai pada anak-anak mereka. Pendidikan Islam di masyarakat nelayan kota Makassar tidak semata berkenaan dengan nilai-nilai moral Islam. Penelitian Muhammad Jibril Tajibu menunjukkan bahwa keyakinan dan pengetahuan masyarakat tentang Islam memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas ekonomi,

salah perkara perbankan syariah. Masyarakat yang menjadi nasabah merasa sangat puas, karena perbankan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ajaran Islam (Karim & Tajibu, 2019).

Sementara penelitian Alfiana *et al* (2021), melihat aspek kolaborasi antara pemerintah dan seluruh insan perikanan dalam rangka pembangunan ekonomi. Kolaborasi ini diupayakan untuk mengatasi banyak kondisi yang tidak seimbang antar aktor, padahal mereka saling terhubung satu sama lain. Dalam membangun hubungan kolaboratif ini, pemerintah juga memperhatikan aspek kultur, seperti hubungan kekerabatan yang selalu mampu mengatasi berbagai konflik kepentingan. Terakhir, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara pemerintah, koperasi insan perikanan sebagai lembaga swasta, dan organisasi masyarakat (Alfiana, Alwi, & Susanti, 2021). Semua penelitian terdahulu memotret aspek kultural yang bernuansa religi dalam hubungannya dengan kekuasaan maupun ekonomi pasar, baik di level domestik maupun global. Namun demikian, perkara yang lebih spesifik, reproduksi nilai dalam relasinya dengan kapitalisme pasar dan strategi pengentasan problem pandemi, belum banyak dibahas.

Penelitian ini mengkaji tentang nilai budaya yang mendasari perubahan sosial masyarakat nelayan Kota Makassar, dengan Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Paotere sebagai lokus ekonominya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi kepada nelayan mengenai nilai budaya yang mendasari perubahan sosial nelayan.

II. METODE

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Paotere Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada bulan Mei 2021.

2.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi untuk memotret aspek strategi dan perubahan sosial. Strategi sosial diartikan sebagai tindakan sosial dalam mencapai tujuan dengan cara-cara yang kreatif. Paradigma ini menggambarkan tentang seseorang yang melakukan tindakan tertentu karena memiliki tujuan (Indraddin & Irwan, 2006:14). Sementara

perubahan sosial di sini berarti perubahan yang menimpa pola perilaku masyarakat, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal ini terkait erat dengan perubahan pada interaksi yang terjadi di tengah masyarakat, ketika mereka sedang melakukan tindakan sosial tertentu (Indraddin & Irwan, 2006: 35).

Dari sini, penggambaran tentang kondisi sebelum pandemi dan memasuki masa pandemi perlu digambarkan secara tersendiri, sehingga komparasi tentang adanya perubahan strategi masyarakat maupun pemerintah dalam menyikapi situasi menjadi jelas dan terang benderang. Sikap-sikap dari masyarakat dan pemerintah menjadi komponen penting, karena menyangkut aspek tindakan sosial. Karena tindakan masyarakat tidak lepas dari basis nilai yang dipegang teguh maka nilai-nilai kultural tersebut juga penting dibahas, sehingga mengkaji perubahan sistem nilai dalam hubungannya dengan aktivitas ekonomi menjadi jelas pula.

2.3. Analisis data

Jenis penelitian adalah kajian pustaka (*library research*). Riset ini memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dengan demikian, riset ini membatasi kegiatan dirinya sendiri hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa perlu memerlukan riset lapangan (Zed, 2008:1-2). Dengan demikian, seluruh informasi tentang situasi yang dialami oleh masyarakat nelayan yang aktifitas ekonomi mereka berpusat di Pelabuhan Paotere, dampak pandemi covid-19 dan kebijakan politik pemerintah terkait aktivitas ekonomi nelayan Paotere, dilihat dari data kepustakaan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ekonomi Masyarakat Nelayan Paotere

Pandemi Covid-19 berlangsung dari awal tahun 2020. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Keppres itu diteken Jokowi pada Senin (13/4/2020) dan telah diunggah di situs web resmi Setneg.go.id. Bunyi poin pertama Keppres tersebut "Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran

Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional," (Ihsanuddin, 2020).

Sebelum memasuki tahun pandemi, tepatnya 2019, harga ikan laut melonjak. Tempat pelelangan Ikan di Kota Makassar meraup untung besar. Harga ikan laut mengalami kenaikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Makassar. Ekonomi yang menggeliat ini jauh dari harga normal, padahal pada saat-saat kondisi cuaca mulai berangsur-angsur normal, yang artinya aktivitas menangkap ikan berjalan sebagaimana semula (Indriani, 2019).

Salah satu Ketua Kelompok Nelayan di TPI Paotere, H Idrus, mengatakan bahwa harga ikan mengalami peningkatan 20 hingga 50 persen. Seperti Ikan Katombo saat ini mencapai Rp100 ribu per 30 ekor yang sebelumnya hanya seharga Rp50 ribu. Kenaikan harga ikan kata dia disebabkan oleh aktifitas melaut sejumlah nelayan yang sempat terhenti beberapa hari belakangan ini saat cuaca ekstrim melanda seluruh perairan di Sulsel.

Di samping itu, mesin perahu para nelayan juga mengalami kerusakan. Olehnya itu, dia berharap adanya bantuan dari pemerintah kepada para nelayan termasuk bantuan sembako lantaran selama seminggu mereka tidak memiliki penghasilan. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Zanty Susilawaty tak menampik adanya lonjakan harga ikan. Sebab, periode Januari ini merupakan cuaca ekstrim yang berdampak nelayan kurang melaut (Indriani, 2019).

Namun, setelah memasuki tahun pandemi, aktivitas ekonomi masyarakat negara di Pelabuhan Paotere mengalami kemerosotan drastis. Ada beberapa aspek penting yang patut dicatat: *Pertama*, dampak pandemi COVID-19 dirasakan mengubah tatanan sosial, ekonomi dan lingkungan di desa, kota, pesisir dan pulau-pulau, termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel bahkan mengganti Pj. Wali Kota Makassar karena dinilai lamban menangani dampak pandemi. *Kedua*, sektor perikanan di Makassar terdampak pandemi, mulai dari rantai produksi perikanan yaitu nelayan sampai ke industri dan kuliner perikanan.

Ketiga, saat pandemi COVID-19, volume dan nilai produksi perikanan dari Makassar turun drastis, profesi nelayan dan operator jasa seperti *pappalimbang*, kapal reguler hingga eksportir hasil laut sangat terpukul. Hasil laut tetap tersedia, tetapi daya beli masyarakat yang rendah dan

tiadanya sarana transportasi membuat harga ikan sempat jatuh hingga 60 persen. *Keempat*, rantai produksi perikanan tangkap yaitu dari nelayan, pengepul (*papalele* dan *punggawa*), suplier sampai ke eksportir terpengaruh dampak pandemi. Nelayan dan pengepul bagian dalam sistem *patron client* bisnis dan sosial di pesisir Makassar. Pengusaha berharap ada bantuan dan terobosan dari pemerintah (Latjindung, Syukri, & Azis, 2020).

3.2. Sistem Nilai Masyarakat Nelayan Paotere

Konstruksi sosial masyarakat pesisir, termasuk masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere, adalah tatanan masyarakat yang kehidupan sosial-budaya mereka dipengaruhi eksistensi kelompok-kelompok sosial lain secara signifikan. Bagaimana pun, kehidupan masyarakat lokal tidak bisa dipisahkan dari pengaruh-pengaruh pasar domestik, nasional, maupun arus globalisasi. Masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir Pelabuhan Paotere memiliki identitas kebudayaan yang berbeda bila dibanding dengan para petani yang hidup di dataran rendah, peladang yang berpusat di sekitaran lahan kering dan dataran tinggi, maupun kelompok masyarakat yang mata pencaharian mereka berpusat di sekitar hutan. Masyarakat nelayan bahkan berbeda bila dibanding dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.

Wujud yang paling mencolok dari sistem nilai dan kebudayaan masyarakat nelayan di pelabuhan Paotere dapat dilihat dalam lembaga yang mereka patuhi. Lembaga sosial ini menjadi sistem norma bagi masyarakat, sekalipun faktor penentu tindakan sosial mereka. Berbagai tujuan yang hendak dicapai harus disesuaikan dengan tujuan atau kegiatan yang diinginkan oleh lembaganya. Setiap nilai atau norma beserta praktiknya harus bersifat fungsional. Artinya, setiap tindakan sosial didasarkan pada sistem nilai yang turut mendukung kepentingan sosial mereka sendiri. Karena itulah, kehidupan masyarakat nelayan di Paotere selalu berubah, terjadi reproduksi yang berulang, seiring dengan dinamika perubahan sosial yang lebih luas. Secara fungsional, perubahan-perubahan sosial tersebut, baik sistem nilai maupun strukturnya, membantu meningkatkan kemampuan *survival* masyarakat. Setiap ada kejadian bermasalah, perubahan sosial inilah yang membuat mereka mampu melakukan penyesuaian diri, baik secara individu maupun berkelompok, untuk menghadapi tantangan

perubahan lingkungan kehidupan mereka (Syaiful, 2019).

Hubungan dialektis antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya menjadi karakteristik perubahan sosial itu sendiri. Dalam beragam lingkungan yang terus berubah dan kenyataan hidup yang harus dijalani oleh masyarakat nelayan di Paotere, karakteristik budaya pun ikut berubah. Ketika sistem nilai dan kebudayaan berubah-ubah, maka tindakan sosial pun berbeda-beda antar waktu. Masyarakat nelayan yang bermukim dan melakukan aktivitas di wilayah Pelabuhan Paotere, aktivitas ekonomi mereka didukung, ditopang, dan berbasis pada sistem nilai dan norma. Artinya, kecenderungan masyarakat didukung oleh sistem nilai dan norma mereka. Integrasi antara nilai, norma, dan tindakan sosial berlangsung setiap waktu.

Beberapa sistem nilai dan norma masyarakat nelayan di pelabuhan Paotere yang bisa disebut di sini antara lain: *Pertama*, *Sikatutui*. Masyarakat Paotere mengartikan *sikatutui* sebagai tindakan untuk selalu mewaspadaikan dan hati-hati. Hal itu dapat dipahami karena latar geografis dan demografis mereka sebagai masyarakat maritim, *sikatuti* menjadi pegangan untuk hidup dan selamat. Norma *sikatuti* berfungsi secara empirik dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bisa memanfaatkan potensi laut sesuai kebutuhannya hanya apabila mampu berhati-hati saat terjun mengarungi lautan. Jika gelombang laut sedang pasang, awan gelap disertai mendung dan petir, maka mereka lebih memilih untuk tidak melaut. Dampaknya pada sektor ekonomi, harga ikan akan tinggi. Harga ikan akan kembali turun dan normal apabila cuaca lautan kembali normal.

Selain nelayan, para pedagang ikan di pelelangan sangat mengapresiasi makna *sipaktutui* ini, sehingga mereka turut memperhatikan perkembangan kondisi jual-beli ikan. Ketika para pedagang ikan melihat faktor alam (cuaca) tidak mendukung, maka perhitungan harga jual-beli pun berubah-ubah drastis. Cuaca alam sangat diperhitungkan, karena memang ia berpengaruh besar pada pasokan ikan dan harga jual-beli ikan. Para pedagang maupun nelayan sama-sama mengerti apa arti kondisi cuaca yang buruk dan cuaca yang baik terhadap harga jual-beli ikan di tempat pelelangan Pelabuhan Paotere. Perubahan alam berdampak pada perubahan drastis ekonomi pasar. Perilaku semacam ini juga dapat disebut sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik.

Para nelayan dan pedagang ikan sejatinya sama-sama mampu mengatasi persoalan permintaan pasar. Mereka melakukan rasionalisasi terhadap harga ikan, setelah sebelumnya mempertimbangkan perubahan cuaca alam. Rasionalisasi di sini tidak lain adalah manifestasi dari nilai *sipakatutui*, sehingga jenis-jenis ikan yang ditawarkan telah bisa diprediksi dengan akurat sesuai perubahan alam. Para pedagang ikan dan nelayan telah memiliki pengetahuan tentang harga ikan berdasarkan jenis sesuai keadaan cuaca. Pengetahuan tentang jenis ikan semacam ini dibangun berdasarkan musimnya. Pada musim tertentu menghasilkan jenis ikan berbeda dibanding musim lain. Pengetahuan tentang musim ini mendorong perilaku sosial yang berbeda, misalnya ketika musim tertentu mereka harus mempersiapkan modal lebih besar. Dengan begitu, mereka tetap bisa mendapatkan ikan sesuai diinginkan dan sesuai dengan permintaan (*demand*) pasar (Syaiful, 2019).

Kedua, *A'bulo Sibatang*. Sistem nilai ini diartikan sebagai semangat bersatu, gotong royong, tolong menolong, saling bersatu. Sehingga tidak ada individu yang terpisah dari individu lain. Kerekatan sosial terjalin begitu rapi. Sistem nilai ini mewujudkan *interkoneksi* sosial, dimana manusia dengan manusia lain terhubung satu sama lain, termasuk ikatan erat antara manusia dengan alam lingkungannya. Masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere memiliki kecenderungan pada ikatan sosial yang sangat *solid*. Laki-laki dan perempuan terjun ke pasar tanpa terkendala oleh batasan-batasan gender. Bahkan, di Pelabuhan Paotere, banyak kompleks pasar yang mayoritas pedagang atau penjaja jualan adalah kaum perempuan.

Sejak semakin berkembangnya pasar dan wilayah Pelabuhan Paotere, semakin banyak perempuan yang beraktivitas di sana. Kaum perempuan ini melakukan cara-cara yang lazim dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tanpa melupakan peran sebagai ibu rumah keluarga. Hadirnya kaum perempuan di pasar ini membantu suami dalam mencari nafkah, sekaligus sebagai simbol kultural bahwa seorang istri pun memiliki kemampuan mencari penghasilan sendiri. Kelompok masyarakat di Pelabuhan Paotere sebenarnya tidak mempersoalkan aktivitas ekonomi dan peran sosial perempuan di luar rumah. Sebab, lingkungan yang dekat dengan sumber

laut/maritim justru menuntut setiap individu untuk mendukung aktivitas ekonomi, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena itulah, ini bukan perkara gender melainkan soal sistem nilai masyarakat, *A'bulo Sibatang* (Syaiful, 2019).

Ketiga, *Sipakatau* (saling menghargai, mempercayai). Dalam ranah ekonomi, nilai ini dianggap sangat penting terutama dalam relasi-relasi usaha yang di wilayah Pelabuhan Paotere. Saling mempercayai merupakan modal sosial utama untuk kemudian bereproduksi ke dalam pranata ekonomi. Kita ambil fakta di lapangan dengan mengamati aktivitas pelelangan ikan. Beberapa nelayan yang menjual ikannya di wilayah Pelabuhan Paotere tidak sedikit yang mempercayakan hasil tangkapannya kepada *pa'cata* atau *broker* yang memiliki keterampilan dalam melelang ikan.

Di samping itu, peran mereka dalam struktur ekonomi juga memperlihatkan jaringan mereka dengan dunia bisnis yang cukup kompleks dalam sistem jual-beli di Pelabuhan Paotere. Peran *pa'cata* apabila cukup sukses dalam memberikan keuntungan kepada nelayan telah mempercayakan hasil tangkapannya untuk dilelang akan menjadi berlanjut secara jangka panjang dalam relasi bisnis ke depannya. Di antara kedua relasi tersebut, memberikan nilai keuntungan sudah seharusnya dilandasi oleh nilai *sipakatau*. Pada penggambaran ini cukup jelas terlihat nilai *sipakatau* menjadi fondasi utama dalam pranata ekonomi, sebagai modal kultural, nilai telah terkonversi menjadi modal ekonomi (Syaiful, 2019).

Setelah memasuki masa pandemi, sistem nilai ini banyak berubah. Annisa Meutia Ratri mengatakan, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi telah dideklarasikan oleh *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia sejak Maret 2020. Dengan kata lain, virus ini telah "memakan" korban manusia dan menyebar secara luas di seluruh dunia. Setelah itu, pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Melalui kebijakan politik ini, maka tahun 2020 ditetapkan tahun pandemi. Pemerintah juga berpikir berbagai strategi untuk menanggulangi penyebaran Pandemi COVID-19. Sebab, apabila sesuatu telah disebutkan sebagai bencana nasional, maka pemerintah pusat bertanggung jawab menuntaskan persoalannya.

Ratri menambahkan, pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai bencana nasional karena

tidak hanya sistem kesehatan dan layanan kegawatdaruratan yang menjadi korban. Lebih dari itu, kondisi ini menimbulkan risiko besar dan juga dampak besar terhadap perubahan kehidupan sosial dan perilaku masyarakat, baik di level elite maupun akar rumput (*grassroot*). Jika kondisi ini memburuk, maka kesejahteraan ekonomi akan merosot. Selain itu, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat berujung konflik. Pada akhirnya, benih-benih konflik sosial itu pun betul-betul terjadi. Selain masyarakat nelayan tidak dapat melaut, pada tanggal 23 April 2020, Liputan6.com merilis berita tentang puluhan nelayan terpaksa berhenti dan tidak boleh melaut akibat dampak dari pandemi. Konflik sosial semacam ini tidak bisa dibiarkan (Rastati, 2020).

Ini pula yang terjadi di Makassar. Ketika ekonomi sulit, investor asing dirasa didukung oleh pemerintah dan masyarakat nelayan merasa dirugikan dengan adanya penambangan pasir. Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), menggelar unjuk rasa di Depan Gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Mengatas namakan ASP, dalam aksinya ada tiga tuntutan diantaranya, menuntut agar izin tambang laut dicabut, menuntut penghentian proyek reklamasi MNP dan, menuntut agar PERDA RZWP3K Sulsel dicabut. Aktivitas *destruktif* tambang pasir laut ini dilakukan oleh PT. Royal Boskalis di wilayah tangkap nelayan Kepulauan Sangkarang, dan diyakini menimbulkan masalah serius bagi kehidupan masyarakat nelayan (Bukabaca, 2020).

3.3. Strategi dan Perubahan Sosial

Dalam menghadapi masalah akibat pandemi, yang berujung konflik dan bertolak belakang dengan kultur lokal masyarakat, pemerintah melakukan strategi-strategi. Pertama, dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Makassar secara konsisten membantu masyarakat nelayan agar mampu meningkatkan produksinya di masa pandemi. Pemerintah meyakini bahwa bantuan-bantuan pemerintah akan berpengaruh besar pada perekonomian sebagai soko guru kehidupan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah kota Makassar dengan cara melengkapi sarana dasar yang menjadi kebutuhan nelayan. Sarana dasar ini diyakini menunjang peningkatan produksi. Pjt. Wali Kota Makassar, Prof. Rudy, menyerahkan sejumlah bantuan berupa *hansprayer* untuk 16 kelompok tani dan

power thresher untuk 5 kelompok tani. Untuk bidang perikanan diberikan pakan, benih bandeng, benih udang, benih lele, nila, dan *spinner* (Wardyah, 2020).

Kemudian, karena dirasa tidak cukup, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulsel, memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan. Peralatan tersebut berteknologi canggih, untuk meningkatkan produksi tangkapan para nelayan di wilayahnya. Pemerintah memastikan semua bantuan akan sampai pada kelompok-kelompok nelayan dan akan melakukan kontral serta pendampingan terhadap mereka saat menerima bantuan. Alat tersebut sangat ramah lingkungan, salah satunya alat tangkap pancing rawai dasar 30 paket untuk lima kelompok. Selain itu, asuransi nelayan dan pembudidaya rumput laut 1.000 poils dengan 619 asuransi nelayan dan 381 asuransi petani rumput laut (Wardyah, Nur Suhra, 2020).

Semua bantuan bagi nelayan dan petani rumput laut ini sangat masuk akal, karena dua sektor inilah yang cukup besar mendapatkan dampaknya. Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan, Sulka S. Latief saat menjadi pembicara webinar yang digelar Mongabay Indonesia, Jumat (17/7/2020) terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau mengakui warga pulau adalah kelompok yang sangat terdampak COVID-19 ini. Menurut Sulka S. Latief, di Makassar, restoran banyak yang tutup, padahal dari restoran inilah masyarakat nelayan bisa mendapatkan harga yang bagus. Ikan-ikan dijual ke sana. Rumput laut pun harganya turun, hanya udang yang bertahan. Dampaknya bisa dirasakan nelayan dan pengusaha apalagi sejak ditutupnya akses masuk ke wilayah kota atau sebaliknya. Kami di dinas, tidak ada anggaran khusus, kami bekerja sama dengan swasta dan pemda.

Laporan lalulintas perikanan ekspor dari Kota Makassar semester I tahun 2019 oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar menyebutkan volume komoditi perikanan mencapai 44 ton dengan total nilai komoditi mencapai 2,4 triliun. Ada lima komoditi teratas yaitu, rumput laut 79%, lalu karagenan 6%, udang vanamei 3%, tuna 2% dan gurita 1%.

Komoditi campuran- seperti aneka ikan karang, pelagis hingga kekerangan- lainnya mencapai 9%. Pada semester yang sama pada tahun 2020, komposisi dan jumlahnya berubah atau turun. Dari data yang disediakan BKIPM Makassar

nampak bahwa rumput laut masih dominan hingga 75,9%, lalu karaginan 8,7%, vanamei 5,5%, gurita 1,8% dan tuna 1,7%. Total komoditi 65 ton dengan nilai Rp2,36 triliun dan komoditi lain, 7% atau turun sekitar 2% dimana tahun lalu terdapat 6.683, 453 ton senilai Rp 627,1 miliar menjadi 4.586,64 ton senilai Rp489,06 miliar (Latjindung, Syukri, & Azis, 2020).

Semua strategi pemerintah untuk menghadapi perubahan sosial karena dampak pandemi Covid-19 didukung oleh tindakan kolektif masyarakat nelayan di Makassar. Salah satunya adalah dengan gerakan anti tambang pasir laut, karena bagi mereka aktivitas penambangan tersebut akan merusak lahan mereka mencari penghidupan. Protes pun terjadi. Hasil penelusuran Koalisi Save Spermonde mengidentifikasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang pasir PT Boskalis berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan Kodingareng yang menurun drastis. Hal ini dipengaruhi oleh keruhnya air laut akibat sebaran sedimen hasil kerukan pasir yang berdampak pada terumbu karang sebagai habitat berbagai organisme laut, rusaknya terumbu karang dapat melumpuhkan ekosistem perairan Spermonde (GreenpeaceIndonesia, 2021).

Dengan demikian, konflik sosial menjadi ending dari perubahan sosial akibat pandemi covid-19, yang menimpa masyarakat nelayan yang aktivitas ekonomi berpusat di pelelangan ikan Paotere, Kota Makassar. Berbagai bantuan

pemerintah untuk memulihkan ekonomi berbasis perikanan dirasa bertentangan dengan keinginannya yang mengizinkan aktivitas pertambangan pasir laut itu sendiri. Perubahan sosial yang terjadi lebih dicitrakan sebagai perubahan yang buruk daripada yang positif. Berbagai strategi mengatasi perubahan sosial, yang dilakukan oleh pemerintah berupa memberikan berbagai jenis bantuan, ternyata di sisi lain dirasakan menderitakan nasib nelayan, dengan memberikan izin penambangna pasir laut.

Masa pandemi Covid-19 ini tidak saja berdampak pada perubahan tatanan sosial di level global, melainkan pada level lokal seperti lingkungan masyarakat nelayan di Kota Makassar juga berubah. Perubahan tidak saja terjadi di sektor ekonomi dan kebijakan pemerintah, melainkan juga menyangkut sektor sosial, kebudayaan dan sistem nilai. Berbagai strategi yang ditempuh pemerintah tampak tidak terintegratif, sehingga kebijakan pemerintah di satu sektor dinilai bertentangan dengan kebijakan di sektor lain yang masih terkait. Dari sanalah, masyarakat nelayan terdorong untuk memasuki arena konflik sosial dan protes terhadap kebijakan politik pemerintah. Perubahan sosial pada masa-masa pandemi ini tidak betul-betul teratasi, bukan saja pada soal kesehatan dan medis melainkan pada ranah sosial-kultural masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

UCAPAN TERIMAKASIH (ACKNOWLEDGMENT)

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan tulisan ini. Terutama kepada orang tua, suami, dan teman-teman atas dukungan moril dan material. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat kepada segenap pembaca.

REFERENSI

- Alfiana, Alwi, & Susanti, G. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Untuk Kesetaraan: Studi Kasus di Kota Makassar. *Journal of Humanity and Social Justice*, 3 (1), 1-15.
- AntaraneWS. (2020). Harga ikan di pelelangan Makassar cenderung turun di tengah pandemi. Retrieved from <https://www.antaraneWS.com/>. Edisi Mei 20, 2021.
- Bukabaca. (2020). Konflik Nelayan Kodingareng Belum Usai, ASP Gelar Aksi. Retrieved from <https://www.bukabaca.id/>. Edisi September 11, 2020.
- CNNIndonesia. (2020). Derita Nelayan saat Pandemi: Ikan Murah hingga Berutang. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/>. Edisi Mei 5, 2020.
- Depdikbud. (1992). *Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. Jakarta. 111 p.
- GreenpeaceIndonesia. (2021). Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng. Retrieved from <https://www.greenpeace.org/>. Edisi Maret 9, 2021.
- Ihsanuddin. (2020). Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional. Retrieved from <https://nasional.kompas.com>. Edisi April 13, 2020.

- Indraddin, & Irwan. (2006). Strategi dan Perubahan Sosial. Deepublish. Yogyakarta. 14 p.
- Indriani, V. R. (2019). Harga Ikan Laut Melonjak di Pelelangan Ikan Makassar. Retrieved from <https://makassar.sindonews.com/>. Edisi Januari 28, 2019.
- Ismail, Z. (2001). Pengembangan Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan. Jakarta. 65 p.
- Karim, K., & Tajibu, M. J. (2019). Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Kemampuan Perbankan Syariah di Makassar dalam Menciptakan Kepuasan Nasabah. Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Entrepreneurship "Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0", (pp. 1-6). Makassar.
- Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. *ar-Ruz Media*. Yogyakarta. 39 p.
- Latjindung, R., Syukri, M., & Azis, K. (2020). Dampak Pandemi di Pesisir Makassar : Dari Penggantian Wali Kota hingga Belitan 'Patron Client' Perikanan [Bagian 1]. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/>. Edisi September 14, 2020.
- LEMSA. (2020). Nestapa Nelayan Kota Makassar Akibat COVID-19. Retrieved from <https://indonesia-timur.com/>. Edisi April 7, 2020.
- May, R. T. (2002). Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: isu, konsep, teori & paradigma. Refika Aditama. Bandung. 87 p.
- Mulkhan, A. M. (2007). Pesan dan kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam hikmah Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Yogyakarta. 175 p.
- Munirah. (2019). Implementasi Pendidikan Islam dalam Keluarga Muslim Pesisir pada Anak Nelayan Cambaya Paotere Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 6 (1), 26-37.
- Rastati, R. (2020). Pandemi COVID-19 dan Nelayan: Menyoal Dampak pada Keberlanjutan Penghidupan. Retrieved from <https://pmb.lipi.go.id/>. Edisi Agustus 10, 2020.
- Sofyan, A. (2006:). Robohnya Pesantren Kami: perselingkuhan ulama' dan umara' dalam perebutan kekuasaan. Listas Pustaka. Jakarta. 68 p.
- Syaiful, M. (2019). Interaksi Sosial dan Reproduksi Nilai Budaya Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Paotere Kota Makassar. *Sosioreligius*, 4 (2), 43-58.
- Wardyah, N. S. (2020). Pemerintah Kota Makassar Bantu Petani dan Nelayan Tingkatkan Produksi. Retrieved from <https://makassar.antaranews.com/>. Edisi November 6, 2020.
- Wardyah, Nur Suhra. (2020). Pemkab Bantaeng Berikan Bantuan Alat Tangkap Kepada Kelompok Nelayan . Retrieved from <https://makassar.antaranews.com/>. Edisi Desember 19, 2020.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 12 p.

How to cite this article:

- Murni, A., Muhammad, R., Sakaria, S., & Sabiq, M. 2021. The Relationship between the Production of Cultural Values and Social Change (Study of the Fisherman Community of Paotere Harbor during the Covid-19 Pandemic). *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 14(2): 207-215. DOI: 10.29239/j.agrikan.14.2.207-215.